

Peningkatan Angka Perdagangan Anak ditengah Upaya Pemerintah Inggris dalam Mengatasi Kasus Perdagangan Anak Tahun 2014 – 2016

Sharon Hofman¹

Elistania²

Abstract

This research discusses about the problem of child trafficking in the United Kingdom. As one of the develop country in Europe, the United Kingdom has a quite high number of child trafficking compared to another country in Europe. This research questioning the reason of why the number of child trafficking increased in the middle of the efforts of the United Kingdom's government in 2014 – 2016. This research uses qualitative methods with the framework of policy implementation to analyze and answer the question of the research. The result of this research showed that the United Kingdom's government in implementing it's policies in it's efforts to combat child trafficking has not been able to give a significant impact due to factors that inhibit the implementation of it's policies, such as the content of it's policies, the performance from the law enforcers and expert staff, the polices, and as well as the other support agencies who working with the government.

Keywords: *child trafficking,, policy implementation, UK government's policies*

Pendahuluan

Perdagangan manusia sudah menjadi masalah kemanusiaan berskala global dengan melibatkan banyak negara, baik sebagai negara asal, negara tujuan maupun negara transit. Perdagangan manusia telah menjadi sebuah bentuk kejahatan yang sulit untuk diberantas hingga saat ini dan disebut sebagai bentuk perbudakan masa kini serta pelanggaran terhadap hak asasi manusia oleh masyarakat internasional. Sejak abad 1980an, angka perdagangan manusia di dunia mengalami peningkatan sehingga menjadikan isu ini masuk ke dalam leberl Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Diperkirakan, 600.000 hingga 800.000 orang diperdagangkan tiap tahunnya melewati batas internasional, dimana 80% dari jumlah tersebut merupakan anak-anak (www.internetjournalofcriminology.com, 2008). Perdagangan manusia nyatanya bukan

¹ Mahasiswi, Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Budi Luhur. email: sharhofman@yahoo.com.

² Dosen Tetap, Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Budi Luhur.

Peningkatan Angka Perdagangan Anak ditengah Upaya Pemerintah Inggris dalam Mengatasi Kasus Perdagangan Anak

hanya terjadi di negara berkembang, tetapi juga di negara maju seperti Inggris. Dimana hal ini diawali dari ambisinya mengkoloni negara-negara dunia ketiga. Perbudakan berkembang seiring dengan meluasnya perdagangan dengan meningkatnya permintaan akan tenaga kerja untuk menghasilkan barang-barang keperluan ekspor (Noerlita & Pakpahan, 2016: 21). Dimana korban dari perdagangan ini bukan hanya orang dewasa, tetapi juga anak-anak yang dianggap lebih menguntungkan untuk diperdagangkan. Di Inggris sendiri, isu perdagangan anak muncul pada tahun 1995 saat *West Sussex Social Service* melaporkan kasus menghilangnya 66 anak pencari suaka (<http://new.ecpat.uk>, 2015).

Inggris sendiri menjadi negara transit dari perdagangan maupun negara tujuan bagi wanita, anak-anak, serta orang-orang yang akan diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual dan pekerja paksa terutama dari negara-negara benua Eropa Timur, Afrika, dan Asia (<http://gvnet.com>, 2009). Pada tahun 2014, diperkirakan ada 2.430 orang yang berpotensi menjadi korban perdagangan yang akan dikirim ke Inggris berasal dari 96 negara dengan jumlah 732 orang merupakan anak-anak. Angka tersebut meningkat signifikan dibandingkan pada tahun 2013 yakni hanya 1.746 kasus yang teridentifikasi, dimana 600 orang diantaranya adalah anak-anak (<http://www.ibtimes.co.uk>, 2015). Kasus yang terjadi ini bisa dibilang merupakan kasus dengan angka yang besar jika dilihat dari latar belakang negara Inggris yang sudah maju dan menjunjung tinggi kesetaraan gender, sehingga sangat disayangkan apabila Inggris terus memiliki angka kasus yang besar dalam masalah perdagangan anak.

Upaya untuk memberantas perdagangan anak ini bukan hanya menjadi fokus masyarakat dunia dan PBB, tetapi juga mendapat perhatian khusus dari pemerintah negara dengan angka perdagangan anak yang tinggi. Sebagai sebuah negara maju dengan angka perdagangan manusia yang tinggi di Eropa, Dewan Eropa juga ikut andil mengatasi isu ini, sehingga pada tahun 1950 Dewan Eropa mengadopsi *European Convention on Human Rights* yang mengakui bahwa hak hidup setiap orang harus dilindungi oleh hukum (<http://globaldetentionproject.org>, 2008). Selain menjadi perhatian dari Dewan Eropa, Pemerintah Inggris juga mendapat tekanan dari berbagai NGO seperti UNICEF UK, ECPAT UK, *Amnesty International*, *Anti-Slavery International* dan NGO lainnya yang mendesak pemerintah Inggris agar segera melakukan penanganan dan lebih fokus dalam mengatasi masalah perdagangan anak yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Beberapa kebijakan, badan-badan penanganan, dan layanan pendukung telah dibuat oleh Pemerintah Inggris terkait masalah ini yang diharapkan dapat membantu meminimalisir angka perdagangan anak yang ada.

Pemerintah Inggris memfokuskan kebijakannya terkait masalah perdagangan manusia berdasarkan dua pendekatan, yaitu dengan menganggap perdagangan ini sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, dan dengan mengkategorikannya sebagai sebuah kegiatan kriminal (Daffron, 2011: 20). Pada tahun 2009 dalam laporan *Trafficking in Person*, Departemen Luar Negeri AS menempatkan Inggris sebagai salah satu negara dalam kategori tingkat 1 yang berarti pemerintah Inggris telah sepenuhnya mematuhi standar minimum terkait Undang-Undang Perlindungan Korban Perdagangan (<http://www.state.gov>, 2009). Undang-undang dan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Inggris dalam mengatasi masalah perdagangan anak pertama kali dibuat tahun 1989 tentang *The Children Act*, yang kemudian diikuti dengan pembuatan *Safeguarding Children involved in Prostitution* tahun 2002, *The Nationality, Immigration and Asylum Act* tahun 2002, *Adoption and Children Act* tahun 2002, *The Sexual Offences Act* tahun 2003, *The Children Act* tahun 2004, *The Asylum and Immigration (Treatment of Claimants) Act* tahun 2004, *Working Together to Safeguard Children* tahun 2006, serta

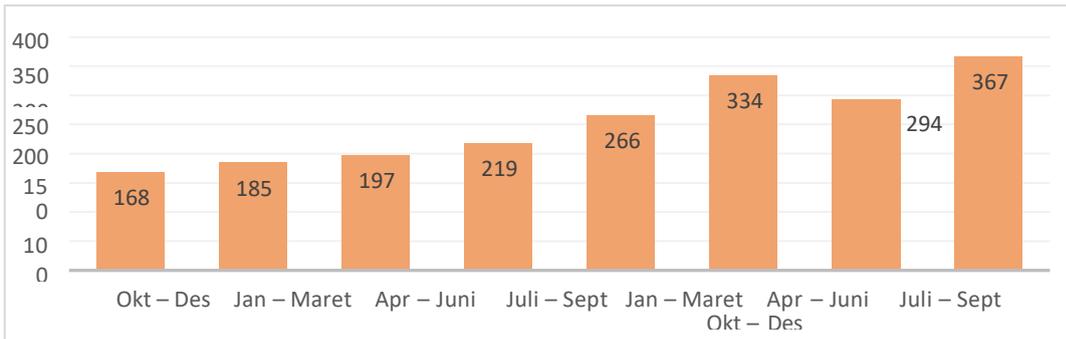
What to do if you're worried a child is being abused tahun 2006 (<https://www.gov.uk>, 2007).

Selain membuat kebijakan dan undang-undang, pemerintah Inggris juga bekerja sama dengan beberapa instansi untuk membangun pusat pelayanan dan jasa untuk membantu para korban perdagangan anak yang membutuhkan perlindungan dan bantuan dari pemerintah seperti *UK Human Trafficking Centre (UKHTC)*, *Child Exploitation and Online Protection Command*, *NSPCC Child Trafficking Advice and Information Line*, *Refugee Council Children's Panel*, *local authority children's social care* (badan perlindungan anak), *local authority asylum teams* (tim penanganan suaka lokal), *local authority children missing education teams* (tim pendidikan untuk anak-anak hilang), *education services* (layanan pendidikan), *health services* (layanan kesehatan), *young offending teams* (kelompok perlindungan pemuda), *police* (polisi), *crown prosecution service* (badan yang mengurus masalah prostiusi), dan *border and immigration agency* (badan perbatasan dan imigrasi).

Pada tahun 2014 hingga 2016 pemerintah Inggris juga telah membuat beberapa upaya baru yang juga menjadi bukti bahwa masalah perdagangan anak ini terus menjadi fokus dan perhatian dari pemerintah Inggris. langkah-langkah tersebut adalah pembuatan *Immigration Act* tahun 2014 dan *Anti-social Behaviour, Crime, and Policing Act* tahun 2014. Kemudian pada tahun 2015, dalam pidatonya David Cameron mengumumkan langkah-langkah baru untuk mengatasi masalah perdagangan anak diantaranya yaitu pembuatan undang-undang yang menjadikan pemerkosaan pornografi sebagai bentuk pelanggaran di Pengadilan Pidana dan Pengadilan Tinggi, ketentuan baru melalui RUU Kejahatan Berat terhadap tindakan komunikasi seksual terhadap anak-anak sebagai sebuah tindakan kriminal, dan juga tentang sifat pedofil, undang-undang yang mengizinkan polisi untuk meminta hotel dan perusahaan sejenisnya yang dirasa polisi menjadi tempat terjadinya eksploitasi seksual untuk memberikan informasi tentang daftar tamu dan pekerjanya, mengamankan situs-situs yang berisi gambar anak-anak yang tidak senonoh dengan mengambil langkah hukum, serta pemberian dana sebesar 10 juta £ tahun 2015–2016 untuk memungkinkan badan-badan penegak hukum di Inggris dapat menciptakan badan dan tim baru dalam menangani masalah perdagangan dan eksploitasi anak (<http://www.gov.uk>, 2015). Selain itu, pemerintah Inggris juga melakukan amandemen terhadap kebijakan *Sexual Offences Act* tahun 2003, pembuatan *Modern Slavery Act* tahun 2015, dan *Immigration Act* tahun 2016.

Upaya yang telah dibuat oleh pemerintah Inggris sejak abad ke 19 ini diharapkan dapat memberikan dampak pengurangan terhadap angka perdagangan anak yang ada, khususnya pada tahun 2014–2016. Perdagangan anak di Inggris terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2014 dimana angka korban melojak hingga 22% dan kemudian menjadi angka tertinggi yang dicatat oleh *United Kingdom Human Trafficking Center (UKHTC)* sejak 2011. Dimana 58% dari korban tersebut merupakan anak-anak yang berusia 15 tahun kebawah, dan 37% lainnya berada diantara usia 16 dan 17 tahun. Pada tahun 2016, *National Crime Agency* sebagai badan yang bertanggung jawab terhadap kejahatan nasional di Inggris memberikan laporan yang mencatat bahwa terdapat 3.805 korban perdagangan manusia yang datang ke Inggris, dimana angka ini menunjukkan adanya peningkatan sebesar 17% dari tahun 2015 sebelumnya. Laporan tersebut juga mencatat bahwa sepertiga dari korban tersebut adalah anak-anak yang berusia 18 tahun kebawah (<http://nationalcrimeagency>, 2014).

Peningkatan Angka Perdagangan Anak ditengah Upaya Pemerintah Inggris dalam Mengatasi Kasus Perdagangan Anak



Grafik 4.1: Angka Perdagangan Anak tahun 2014 s/d 2016

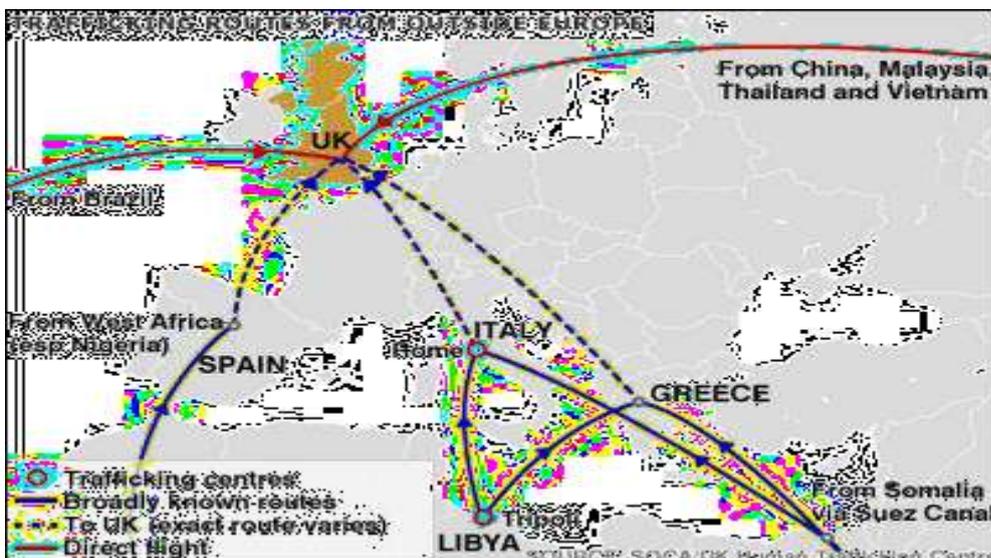
Sumber: *National Crime Agency (NCA), "Human Trafficking: National Referral Mechanism Statistic"*

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, kita dapat melihat bahwa pemerintah Inggris telah melakukan berbagai upaya yang diharapkan dapat membantu mengurangi angka perdagangan anak yang ada. Namun, upaya pemerintah ini belum bisa memberikan hasil yang signifikan seperti yang diharapkan oleh pemerintah Inggris. Sehingga, hal ini mendorong penulis untuk mengajukan pertanyaan penelitian penulis yaitu "Mengapa angka perdagangan anak meningkat di tengah upaya yang dilakukan pemerintah Inggris dalam mengatasi kasus perdagangan anak tahun 2014 – 2016?"

Pembahasan

Analisis Meningkatnya Angka Perdagangan Anak di Tengah Upaya Pemerintah Inggris Tahun 2014 – 2016

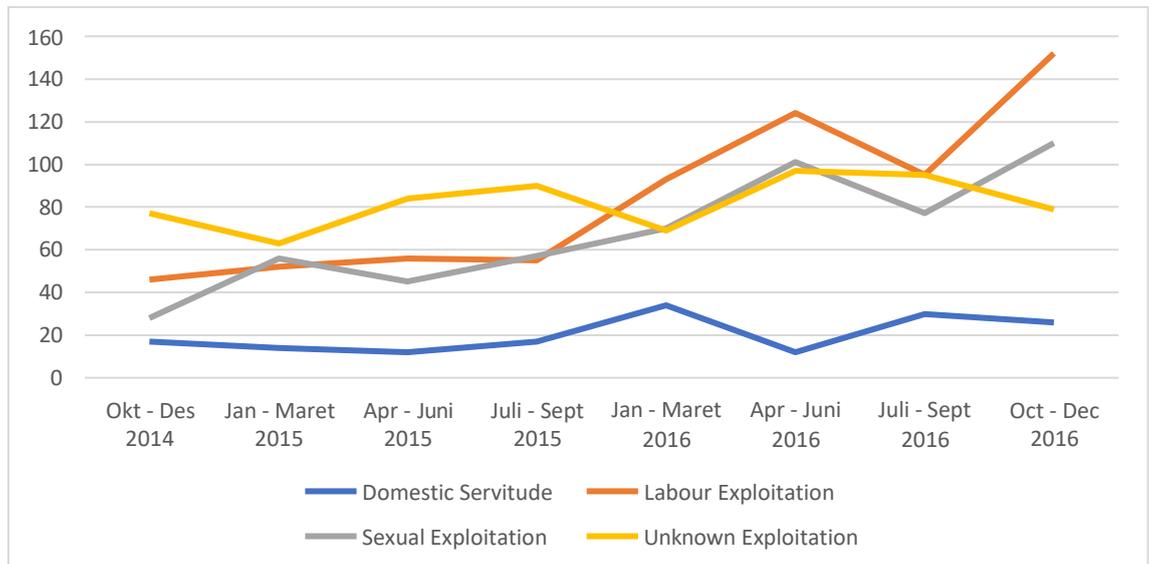
Data yang telah dipaparkan sebelumnya menunjukkan bahwa angka perdagangan anak di Inggris terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dimana anak-anak korban perdagangan yang diperdagangkan ke Inggris ini sebagian besar berasal dari Tiongkok. Selain itu, negara-negara lain juga memberikan kontribusi dalam angka perdagangan anak di Inggris terutama dari Nigeria, Eritrea, Kenya, Somalia, Rumania, Albania, Maldiva, Bulgaria, Rusia, Thailand, Vietnam, Kamboja, serta Laos (<http://lastradainternational.org>, 2007). Anak-anak ini datang ke Inggris melalui berbagai rute seperti:



Gambar 4.1: Rute Perdagangan Manusia Dari Luar Eropa

Sumber: Home Office, "An evidence assessment of the routes of human trafficking into the UK"

Gambar di atas menjadi contoh dari beberapa rute yang digunakan oleh para pelaku perdagangan untuk membawa korban baik anak-anak maupun orang dewasa yang akan dibawa Inggris untuk diperdagangkan. Anak-anak itu dikirim dari negara asal mereka seperti Asia dan Eropa melalui rute yang telah disiapkan baik melalui udara, darat maupun laut untuk bisa sampai ke Inggris. Dimana anak-anak ini dibawa ke Inggris dan dipekerjakan untuk memenuhi kebutuhan (*demand*) masyarakat Inggris akan pekerja domestik, pekerja buruh, korban eksploitasi seksual, dan bentuk eksploitasi lainnya.



Grafik 2.3: Angka Perdagangan Anak di Inggris tahun 2014-2016

Sumber: National Crime Agency (NCA), "Human Trafficking: National Referral Mechanism Statistics"

Dari statistik diatas, dapat dilihat adanya peningkatan terhadap angka korban perdagangan anak di Inggris dari tahun ke tahun mulai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Adanya *demand* atau kebutuhan dari masyarakat Inggris terhadap anak-anak ini membuat angka perdagangan anak di Inggris terus mengalami peningkatan.

Lemahnya Kebijakan Pemerintah Inggris

Pemerintah Inggris dalam upayanya untuk mengatasi masalah perdagangan anak di Inggris telah membuat berbagai macam kebijakan dari tahun 1989 hingga tahun 2016. Dimana isi dari kebijakannya selalu berfokus pada pemberian perlindungan, penjagaan, penjaminan, dan pembinaan terhadap anak-anak korban perdagangan. Salah satu kebijakan yang akan menjadi fokus penulis dalam hal ini adalah pada kebijakan *The Child Act* yang dibuat tahun 1989 yang merupakan kebijakan regional Inggris terkait perdagangan anak. Kebijakan ini dibuat untuk memberikan jaminan kepada anak-anak yang telah menjadi korban perdagangan untuk mendapatkan layanan dan dukungan dari otoritas lokal mereka. Kebijakan ini juga mengatur tentang organisasi-organisasi yang dibuat oleh masyarakat yang berkaitan dengan perlindungan terhadap korban perdagangan (<http://www.gov.uk>, 2015). Dimana menurut penulis, isi dari kebijakan-

Peningkatan Angka Perdagangan Anak ditengah Upaya Pemerintah Inggris dalam Mengatasi Kasus Perdagangan Anak

kebijakan lain dari pemerintah juga selalu berfokus pada bagaimana pemerintah akan menjaga, menjamin, dan mensejahterakan anak-anak korban perdagangan.

Selain berfokus pada pemberian perlindungan terhadap anak-anak korban perdagangan, pemerintah juga membuat kebijakan yang mengatur pemberian hukuman kepada oknum-oknum yang bertanggung jawab terhadap anak-anak yang diperdagangkan. Pemerintah Inggris membuat kebijakan yang mengatur berbagai macam bentuk kekerasan dan eksploitasi anak sebagai bentuk pelanggaran hukum yang ada. Pemberian masa tahanan terhadap para pelaku juga diatur dalam berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Inggris, seperti *The Nationality, Immigration and Asylum Act* tahun 2002 dan *Sexual Offences Act* tahun 2003 yang dibuat oleh pemerintah Inggris untuk menjadikan pelaku-pelaku perdagangan anak dengan segala bentuk eksploitasi dijerat dengan hukum prostitusi illegal.

Masuk pada tahun 2014-2016, dimana pada tahun-tahun ini angka perdagangan anak terus mengalami peningkatan ditengah pembuatan kebijakan-kebijakan baru yang dibuat oleh pemerintah Inggris. Salah satunya pembuatan *Immigration Act* tahun 2014 dan 2016. Kebijakan ini dibuat oleh pemerintah dengan harapan dapat mengontrol angka penyelundupan korban perdagangan yang akan datang ke Inggris. Namun pada nyatanya, kebijakan ini malah merugikan anak-anak korban perdagangan yang ada di Inggris. *Anti-slavery* sebuah organisasi HAM tertua di dunia serta para aktivis buruh mengatakan bahwa kebijakan tentang imigran ini tidak dapat membantu meminimalisasi angka perdagangan anak yang ada di Inggris. Sebaliknya, kebijakan ini mengakibatkan beberapa korban perdagangan anak yang berhasil melarikan diri dan kemudian melaporkan keadaannya kepada pihak kepolisian ditangkap sebagai pekerja illegal karena tidak memiliki identitas yang jelas dengan hukuman 12 bulan dan denda yang sangat tinggi (<http://www.theguardian.com>, 2016).

Pemulangan kembali atau deportasi yang dilakukan oleh pemerintah Inggris sebagai bentuk kebijakannya juga tidak memberikan dampak positif bagi para korban perdagangan. Tingginya resiko bahwa korban tersebut akan diperdagangkan kembali menjadi salah satu alasan mengapa langkah tersebut tidak dapat menjadi cara yang tepat dalam mengatasi masalah ini. Hal ini juga dapat dimanfaatkan oleh para pelaku untuk mengontrol para korban. Dimana pelaku akan memanfaatkan proses hukum yang tidak menguntungkan bagi para korban ini agar mereka tidak dapat melapor kepada pihak kepolisian bahwa mereka adalah korban perdagangan, karena takut akan ditangkap dan dimasukkan kedalam penjara dan berisiko untuk dipulangkan kembali ke negara asal atau harus membayar denda karena telah melanggar hukum imigrasi.

Isi dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah diharapkan memiliki tujuan dan tepat sasaran dalam membantu menangani masalah perdagangan anak yang ada. Sayangnya, kebijakan dari pemerintah Inggris dalam menghadapi masalah ini dirasa belum cukup. Kebijakan yang dibuat pemerintah Inggris untuk mengidentifikasi korban perdagangan dan memberikan perlindungan kepada mereka menunjukkan bahwa =pemerintah Inggris sangat peduli terhadap anak-anak korban perdagangan. Pemerintah Inggris ingin agar para korban dapat menerima pelayanan, perlindungan dan dukungan setelah mereka mengalami berbagai tindakan kekerasan baik secara fisik maupun mental yang mungkin dapat menyebabkan trauma bagi anak-anak ini. Namun pada kenyataannya, kebijakan ini belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Sehingga, cara pemerintah dengan berfokus pada pemberian perlindungan kepada mereka yang telah menjadi korban tidak dapat membantu Inggris dalam melawan perdagangan anak yang ada.

Bahkan banyak diantara para korban yang telah diselamatkan harus terlebih dahulu melewati serangkaian proses suaka yang rumit, dan kemudian diperhadapkan

dengan kenyataan bahwa kasus mereka sangat sulit untuk ditelusuri (<http://www.express.co.uk>, 2014). Hal ini menjadi salah satu alasan yang dirasa penulis bahwa fokus pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada para korban tidak dapat menjadi jawaban dalam mengatasi masalah perdagangan anak jika dilihat dari proses pengimplementasiannya. Selain itu, dukungan yang didapat pemerintah dari berbagai pihak seperti kepolisian dan badan-badan penanganan yang dibuat oleh pemerintah selama proses kebijakan itu berjalan juga memberikan dampak terhadap keberhasilan dari kebijakan itu sendiri.

Lemahnya Badan Penanganan Terhadap Korban

Dalam upaya yang dilakukan pemerintah Inggris untuk mengatasi angka perdagangan anak di Inggris tidak hanya berupa pembuatan-pembuatan kebijakan, tetapi juga dengan membuat badan-badan pendukung lainnya. Dimana dalam tujuan pembentuk badan tersebut pemerintah memfokuskan pada pemberian fasilitas, dukungan, dan perlindungan bagi para korban seperti yang selalu menjadi fokus pada isi kebijakan pemerintah Inggris. Selain pembuatan badan penanganan, pemerintah juga bekerja sama dengan berbagai pihak pendukung seperti pihak kepolisian yang juga memiliki peran penting. Pemberian perlindungan bagi para korban dan mengidentifikasi adanya pelanggaran yang berhubungan dengan perdagangan, perbudakan, dan eksploitasi seksual, merupakan garis besar dari tugas pihak-pihak tersebut. Namun, jika tugas-tugas itu tidak dapat berjalan dengan baik, maka sudah pasti tujuan dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Inggris juga tidak dapat memberikan hasil.

Pemerintah Inggris membentuk beberapa badan penanganan diantaranya adalah *local authority children's social care* hingga badan lain seperti *local authority asylum team*, dan *local authority missing education teams* yang bertugas untuk memberikan perlindungan, dukungan, dan jaminan bagi anak-anak. Namun pada pengimplementasiannya, terdapat banyak kekurangan yang menjadi hambatan dalam menjalankan tugas-tugas dari badan tersebut, salah satunya adalah kurangnya staf yang memadai dan kurangnya pengetahuan dan kesadaran mereka tentang pentingnya memberikan perlindungan dan dukungan bagi para korban perdagangan. Berbagai macam dampak negatif yang terjadi akibat adanya kelemahan serta kekurangan dari badan penanganan terhadap korban orang ini membuat pemerintah makin sulit untuk mengatasi masalah perdagangan anak yang ada.

Sekitar 40% dari anak-anak korban perdagangan yang ditempatkan di salah satu badan penanganan milik pemerintah yang jaraknya sangat jauh dari kota serta jangkauan pemerintah, sehingga akan sulit bagi mereka untuk mendapatkan perlindungan, dukungan, dan fasilitas yang memadai (<http://www.antislavery.org>, 2014). Selain itu, adanya data yang menunjukkan bahwa banyak anak-anak korban perdagangan yang melarikan diri dari tempat perlindungan mereka menjadi bukti bahwa fasilitas dan dukungan yang mereka dapatkan di badan-badan penanganan milik pemerintah belum bisa memenuhi kebutuhan para korban. Dimana pada tahun 2015, ECPAT UK sebuah badan NGO yang berdedikasi untuk memerangi dan mengakhiri kejahatan eksploitasi mengeluarkan data tentang korban perdagangan anak. Mereka menyatakan bahwa hamper 600 anak yang berada ditempat perlindungan yang disediakan oleh pemerintah menghilang, dengan total 200 anak yang masih belum ditemukan hingga akhir tahun 2016 (<http://www.bbc.com>, 2016).

Polisi juga menjadi salah satu aktor penting (dalam hal ini merupakan aparat pemerintah) dalam mengimplementasikan kebijakan dimana polisi bertugas untuk memberikan perlindungan pertama kepada korban yang datang untuk melaporkan

Peningkatan Angka Perdagangan Anak ditengah Upaya Pemerintah Inggris dalam Mengatasi Kasus Perdagangan Anak

adanya tindak kekerasan yang dialaminya maupun kepada korban yang diidentifikasi sebagai korban perdagangan. Adanya komunikasi antara pemerintah dengan pihak kepolisian sangat diperlukan untuk memberikan arahan kepada para polisi bahwa masalah perdagangan ini merupakan hal yang sangat penting. Pihak polisi diharapkan mengetahui isi, tujuan, arah dan kelompok sasaran dari kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah Inggris. Namun pada kenyataannya, pihak kepolisian belum bisa menjalankan perannya dengan baik, dalam hal memberikan perlindungan serta mengidentifikasi korban perdagangan.

Salah satu contoh kurangnya komunikasi yang baik antara pihak pemerintah dan kepolisian dapat dilihat dari salah satu kasus yang terjadi di Inggris. Disampaikan oleh akademisi dari *Royal Holloway University*, bahwa terdapat beberapa kasus dimana anak-anak ini ditetapkan sebagai tersangka bukan sebagai korban. pada tahun 2011, *Child Rights International Network* menyatakan bahwa hamper selama satu dekade, polisi Inggris berjuang untuk mengatasi ledakan kriminalitas terkait dengan perdagangan ganja. Banyak anak-anak dari Vietnam yang dibawa ke Inggris menjadi korban untuk bekerja diladang ganja dikarenakan keluarga mereka terlilit hutang, sehingga mereka harus bekerja untuk membayar hutang keluarganya (<http://www.crin.org>, 2011).

Perlakuan aparat polisi tersebut mengakibatkan anak-anak ini tidak bisa mempercayai polisi maupun pemerintah. Ditambah dengan trauma psikologis mereka yang terganggu akibat kekerasan fisik dan emosional yang dialami, mereka akan sulit menceritakan keadaan mereka yang sebenarnya kepada polisi karena merasa khawatir terhadap anggota keluarga mereka yang ada di Vietnam, khususnya bagi mereka yang menjadi korban perdagangan untuk melunasi hutang keluarga mereka. Mereka beranggapan bahwa aparat kepolisian tidak bisa memberikan perlindungan dan dukungan yang mereka butuhkan. Biasanya anak-anak ini akan dibawa ke tempat perlindungan atau penampungan pemerintah, ataupun dikembalikan atau dideportasi ke negara asal mereka tanpa mengetahui latar belakang permasalahan dari anak-anak korban perdagangan ini.

Pemulangan anak-anak kembali ke negara asal mereka setelah ditetapkan sebagai korban juga bukan merupakan solusi yang baik. Tanpa melihat latar belakang mengapa anak-anak tersebut menjadi korban perdagangan manusia dari awal, dapat menyebabkan anak-anak ini berpotensi untuk diperdagangkan kembali. Pemerintah harus melakukan langkah baru seperti pemberian wali yang sah untuk anak-anak korban perdagangan ini agar dapat mendukung mereka dalam melewati masa-masa sulit mereka setekah menjadi korban perdagangan. Selain itu, pemberian perlindungan dan fasilitas yang dapat mendukung mereka terlepas dari trauma yang dialami selama mereka menjadi korban juga perlu menjadi perhatian.

Selain itu, ada alasan lain yang menyebabkan penulis menganalisis bahwa pihak kepolisian kurang memahani isi dari kebijakan pemerintah yang berfokus pada perlindungan anak yang ada di Inggris. Tahun 2016, *The All-Party Parliamentary Group for Runaway and Missing Children and Adult* memutuskan untuk melakukan penyelidikan tentang anak-anak yang hilang dari tempat perlindungan. Dimana pada tahun 2013, sistem pencatatan polisi mulai menggolongkan anak-anak tersebut dalam 2 kategori yaitu "*missing*" dan "*absent*". Setidaknya terdapat 10.000 anak dari total 21.339 anak yang digolongkan sebagai "*absent*" sehingga secara efektif terlepas dari radar dan tidak menjadi prioritas pihak kepolisian. Kategori "*missing*" diartikan sebagai siapa pun yang menghilang dari tempat penampungan dengan keberadaan yang tidak diketahui sehingga dianggap berisiko untuk menjadi subjek dari kejahatan yang dapat merugikan diri mereka sendiri. Artinya, mereka termasuk dalam prioritas polisi. Sedangkan kategori "*absent*" diartikan sebagai seorang anak yang tidak berada di tempat penampungan dimana ia seharusnya

berada, dengan lokasi keberadaan yang tidak diketahui dimana ia berisiko untuk menjadi korban perdagangan ataupun korban eksploitasi lainnya. Artinya, mereka tidak masuk dalam prioritas polisi (<http://cdn.basw.co.uk>, 2016).

Sebuah surat kabar juga berpendapat bahwa kabinet, polisi, dan para pekerja sosial telah gagal mencegah penyebaran perdagangan dan perbudakan modern di Inggris. Sistem hukum yang rumit di Inggris menyebabkan banyak anak-anak korban perdagangan ditetapkan sebagai tersangka pelanggaran migrasi. Hal ini juga berkaitan dengan kinerja para polisi yang juga dianggap tidak berjalan dengan semestinya. Seorang wakil kepala polisi pernah menetapkan seorang gadis yang berhasil melarikan diri dari rumah pelacuran dan melarikan diri ke kantor polisi dimana ia menceritakan tentang bagaimana dia bisa diperdagangkan. Namun karena gadis ini tidak memiliki pasport, maka pihak kepolisian kemudian memutuskan untuk menangkapnya sebagai seorang imigran ilegal (<http://www.theguardian.com>, 2013).

Selain itu, ditemukan juga adanya sikap diskrimatif yang dialami oleh anak-anak korban perdagangan yang berasal dari luar Inggris dan luar Uni Eropa. Dimana pada tahun 2012, terdapat 80% korban perdagangan yang merupakan warga negara Inggris dan Uni Eropa telah ditangani oleh UKHTC dan mendapatkan perlindungan yang dibutuhkan dari pemerintah. Tetapi hanya kurang dari 20% kasus dari anak-anak yang berasal dari luar Uni Eropa yang berhasil di proses oleh Badan Visa dan Imigrasi Inggris. Untuk kasus terkait anak-anak yang berasal dari luar Eropa, proses penetapan status mereka sebagai korban biasanya 4 kali lebih sulit untuk didapatkan (<http://www.antislavery.com>, 2016). Sehingga, dengan adanya tindakan diskrimatif ini, anak-anak yang berasal dari luar Eropa sulit untuk mendapat perlindungan dan dukungan yang mereka butuh dari pemerintah Inggris.

Penulis telah menjabarkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi mengapa pemerintah Inggris belum dapat mengatasi perdagangan anak di Inggris. Mulai dari isi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Inggris, serta pada proses pengimplementasiannya dimana lemahnya dukungan yang diberikan oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan kebijakan yang telah dibuat. Dari seluruh undang-undang tentang perdagangan anak yang dimiliki Inggris yang telah dibahas di Bab III, penulis menganalisis bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Inggris selalu mengacu pada proses (1) mengadili dan mengkriminalisasi segala bentuk perdagangan dan eksploitasi seksual; (2) menyediakan perlindungan kepada para korban; dan terakhir (3) mengembangkan program-program pencegahan. Penulis menganalisis bahwa proses tersebut yang kurang tepat, karena menurut penulis tindakan pencegahan semestinya harus menjadi upaya pertama dan prioritas pemerintah Inggris dalam menangani masalah perdagangan anak.

Banyaknya faktor-faktor yang juga menghambat pemerintah dalam memberikan perlindungan yang terbaik bagi para korban. seperti yang telah dipaparkan penulis sebelumnya, hal itu yang membuat penulis merasa akan sangat sulit untuk menangani masalah perdagangan anak jika pemerintah Inggris hanya terus berfokus pada perlindungan di tiap kebijakan yang dibuatnya, jika dilihat dari banyak ketimpangan yang terjadi. Selain itu, polisi sebagai salah satu faktor pendukung pemerintah dalam menghadapi perdagangan anak juga diharapkan untuk lebih berfokus pada pencegahan terjadinya kejahatan ini daripada fokus pada penangkapan para pelaku. Fokus pada pencegahan jauh lebih baik daripada mencoba membawa pelaku kejahatan kedalam pengadilan (Todres, 2010: 4). Dengan melakukan tindakan pencegahan yang lebih, maka polisi dan pemerintah dapat mencegah lebih sedikit anak-anak menjadi korban perdagangan dan eksploitasi seksual (<http://www.theguardian.com>, 2013).

Salah satu tindakan pencegahan yang bisa dilakukan oleh pemerintah Inggris

Peningkatan Angka Perdagangan Anak ditengah Upaya Pemerintah Inggris dalam Mengatasi Kasus Perdagangan Anak

adalah dengan mengatasi peningkatan kebutuhan terhadap para korban perdagangan. Menurut *The Guardian*, tingginya angka perdagangan anak di Inggris disebabkan karena tingginya angka permintaan (*demand*) terhadap mereka. Dimana kebutuhan untuk barang-barang, pekerja domestik, dan pekerja domestik, dan pekerja seks yang bisa dibayar murah, anak-anak yang bisa menjalankan perkebunan ganja dengan bayaran murah, hingga menjadi korban penjualan organ tubuh (<http://www.theguardian.com>, 2016). Seperti yang terjadi di Inggris terkait eksploitasi seksual yang ada, dimana angka anak-anak yang diperdagangkan dengan tujuan eksploitasi seksual merupakan penyumbang kedua terbesar setelah buruh ditahun 2014 hingga 2016. Hal ini disebabkan oleh industry seks yang meluas di Inggris yang mengakibatkan kebutuhan akan perempuan yang akan diperdagangkan juga semakin meningkat.

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang menjadi alasan mengapa pemerintah Inggris sebagai negara maju tidak dapat mengatasi angka perdagangan anak yang ada dikarenakan karena kebijakan dari pemerintah selalu berfokus kepada penangkapan dan mengkriminalisasi pelaku yang berkaitan dengan segala bentuk perdagangan dan eksploitasi anak serta pemberian perlindungan kepada para korban. Dari semua kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah yang telah penulis paparkan sebelumnya, dapat dilihat bagaimana mayoritas dari kebijakan tersebut selalu berfokus pada 2 hal tersebut. Sehingga, untuk dapat membantu pemerintah Inggris dalam mengatasi perdagangan anak adalah dengan menjadikan pencegahan sebagai fokus utama dari kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah Inggris.

Tindakan pencegahan yang dapat dilakukan oleh pemerintah Inggris salah satunya adanya dengan menghentikan permintaan terhadap para anak-anak dengan berbagai tujuan seperti untuk korban eksploitasi, pekerja buruh, pekerja rumah tangga, perdagangan organ tubuh dan sebagainya. Hal ini bisa memberikan dampak yang lebih besar terhadap upaya pemerintah Inggris dalam mengurangi angka perdagangan anak daripada berupaya untuk memberikan perlindungan pada anak-anak yang sudah menjadi korban. Selain itu, upaya pemerintah dalam menyediakan perlindungan, dukungan, dan fasilitas yang memadai bagi para korban juga belum bisa berjalan dengan baik. Badan penanganan yang menjadi tempat perlindungan dan tempat tinggal sementara bagi para korban masih belum bisa membantu anak-anak untuk mendapatkan pertolongan yang mereka butuhkan. Sehingga, banyak dari mereka yang memilih untuk melarikan diri dari tempat perlindungan dan kemudian berisiko untuk ditangkap dan diperdagangkan kembali oleh para pelaku.

Selain itu, kinerja dari pihak kepolisian sebagai aktor pendukung utama dalam memberikan perlindungan terhadap anak-anak korban perdagangan juga masih belum dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Masih banyak anak-anak yang diperlakukan sebagai tersangka bukannya mendapatkan perlindungan sebagai korban karena telah menjadi imigran ilegal. Selain itu, adanya sikap diskriminatif antara anak-anak yang berasal dari Eropa dan luar Eropa juga menjadi faktor mengapa polisi tidak bisa memberikan perlindungan yang dibutuhkan oleh anak-anak ini. Hal ini membuat anak-anak dengan kondisi psikologis yang sedang lemah yang akhirnya membuat mereka sulit untuk mempercayai pihak kepolisian dan bahkan pemerintah.

Referensi

Noerlita, Artika Endah & Pakpahan, Saiman. (2016). Peran Walk Free Foundation dalam Mengatasi Modern Slavery di Mauritania. Pekan Baru: UNIVRAB Press.

- Daffron, Joshua W. (2011). *Combating Human Trafficking: Evolution of State Legislation and the Policies of the United Kingdom and France*. California: Masters Dissertation, Naval Postgraduate School Thesis.
<http://www.justiceacademy.org/iShare/LibraryNPS/11Dec%255FDaffron.pdf> diunduh 15 Oktober 2017.
- Jonathan Todres. (2010). "Taking Prevention Seriously: Developing a Comprehensive Response to Child Trafficking and Sexual Exploitation" *Vanderbilt Journal of Transnational Law* (43): 1. https://www.vanderbilt.edu/wp-content/uploads/sites/78/Todres_camera_ready_final-2.pdf diakses 25 Desember 2017.
- Noris, Lorinda. (2008). "Child Trafficking in the UK: An Examination of Contemporary Approaches". *Internet Journal of Criminology*.
<https://www.scribd.com/document/200843570/Norris-Child-Trafficking-in-the-UK> diakses 26 Oktober 2017.
- APPG. 2016. Inquiry into the safeguarding of 'absent' children: 'It is good when someone cares'. http://cdn.basw.co.uk/upload/basw_44641-3.pdf diakses 20 Desember 2017.
- Council of Europe. 2008. *The European Convention on Human Rights*.
<http://www.globaldetentionproject.org/fileadmin/docs/European-Convention-on-Human-Rights.pdf> diakses 15 Oktober 2017.
- Department for Education. 2015. *The Children Act 1989 guidance and regulations Volume 2: Care planning, placement and case review*. https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/441643/Children_Act_Guidance_2_015.pdf diakses 26 November 2017.
- ECPAT UK. 2015. Working against child trafficking. <http://new.ecpat.org.uk/content/working-against-child-trafficking> diakses pada 25 Oktober 2017.
- HM Government. 2007. Safeguarding children who may be trafficked. https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/177033/DFE-00084-2011.pdf diakses 16 Oktober 2017.
- Home Office, CEOP. 2007. A Scoping Project on Child Trafficking in the UK. <http://lastradainternational.org/lsidocs/388%20Child%20Trafficking%20report%20UK.pdf> diakses 8 Desember 2017.
- National Crime Agency, 2014, *Human Trafficking : National Referral Mechanism Statistics*, <http://www.nationalcrimeagency.gov.uk/publications/national-referral-mechanism-statistics/2014-nrm-statistics/558-human-trafficking-national-referral-mechanism-statistics-october-to-december-2014/file> diakses 12 November 2017.
- U.S. Department of State. 2009. *Trafficking in Person Report*.
<http://www.state.gov/documents/organization/123357.pdf> diakses 15 Oktober 2017.
- U.S. State Dept. *Trafficking in Person Report*. 2009. *Human Trafficking and Modern day Slavery*. <http://gvnet.com/humantrafficking/UK-2.htm> diakses 15 Oktober 2017.
- Anti Slavery International. (2014). "Lack of protection for trafficking victims with children in the UK." <https://www.antislavery.org/lack-protection-trafficking-victims-children-uk/> diakses 20 Desember 2017.
- Anti Slavery International. (2016) "10 things you didn't know about slavery in UK." <https://www.antislavery.org/10things/> diakses 20 Desember 2017.
- CRIN. (2011). "UK: Vietnamese children trafficked to work in uk cannabis trade as prosecuted as criminals." <https://www.crin.org/en/library/news-archive/uk-vietnamese-children-trafficked-work-uk-cannabis-trade-are-prosecuted> diakses 20 Desember 2017.
- Cameron, David. (2015, 3 Maret). Pidato Perdana Menteri Inggris untuk mengumumkan langkah baru untuk mengatasi eksploitasi anak di Downing Street.
<https://www.gov.uk/government/news/pm-unveils-tough-new-measures-to-tackle-child-sexual-exploitation> diakses 5 Desember 2017.
- BBC News. (2016, 15 November). "Child trafficking: Scores missing from UK care homes." <http://www.bbc.com/news/uk-37982221> diakses 20 Desember 2017.
- Express. (2014, 11 Januari). "Child trafficking victims failed by the UK Government, experts claim." <https://www.express.co.uk/news/uk/453314/Child-trafficking->

Peningkatan Angka Perdagangan Anak ditengah Upaya Pemerintah Inggris dalam Mengatasi Kasus Perdagangan Anak

- [victims- failed-by-the-UK-Government-experts-claim](#) diakses 20 Desember 2017. Ibtimes.co.uk. (2015, 27 July). "UK human trafficking cases on the rise despite government's Modern Slavery Act". <http://www.ibtimes.co.uk/uk-human-trafficking-cases-rise-despite-governments-modern-slavery-act-1512840> diakses 15 Oktober 2017.
- The Guardian. (2013, 29 April). "Police 'should focus more on preventing crime than catching criminals'." <https://www.theguardian.com/uk/2013/apr/29/police-focus-crime-catching-criminals> diakses 25 Desember 2017.
- The Guardians. (2013, 31 Oktober). "Trafficking victims too often treated as immigration cases, say campaigners." <https://www.theguardian.com/law/2013/oct/31/trafficking-victims-immigration-campaigners> diakses 20 Desember 2017.
- The Guardian. (2016, 10 Juli). "Modern slavery and human trafficking on the rise in UK." <https://www.theguardian.com/law/2016/jul/10/modern-slavery-on-rise-in-uk> diakses 25 Desember 2017.
- The Guardian. (2016, 21 Desember). "UK immigration bill will play into hands of traffickers, anti-slavery experts warn." <https://www.theguardian.com/globaldevelopment/2015/dec/21/uk-immigration-bill-trafficking-anti-slavery-experts-modern-slavery-act-2015> diakses 24 Desember 2017.